



## **Relevansi Kajian Pengembangan Masyarakat dalam Mewujudkan SDGs**

Sheiful Yazan

Dosen Komunikasi Pembangunan  
FDIK UIN IB Padang

Arwemi

Dosen Bahasa Inggris  
FAH UIN IB Padang

### **ABSTRAC**

Sustainability Development has been a topic of discussion since 1992, then it came to be the development concept of UN member states, through the SDGs at the 70th UN General Assembly, September 2015. Development documents reveal the dominant role of government, as the one and only development actor. This paper discusses the relevance of community development studies in this regard.

**Keywords: development, development actors, SDGs, PMI's studies.**

### **ABSTRAK**

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi topik pembicaraan sejak 1992, kemudian menjadi konsep pembangunan bersama negara-negara anggota PBB, melalui SDGs pada Sidang Umum ke-70 PBB, September 2015. Dokumen pembangunan memperlihatkan peran dominan pemerintah, seolah-olah satu-satunya aktor pembangunan. Tulisan ini membahas relevansi kajian pengembangan masyarakat dalam hal ini.

**Kata kunci: pembangunan, aktor pembangunan, SDGs, kajian PMI**

## Pendahuluan

Setelah KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, ungkapan “Pembangunan Berkelanjutan” muncul sebagai konsep pembangunan yang populer dan menjadi fokus masyarakat dunia. Istilah “pembangunan berkelanjutan” menjadi istilah yang paling sering digunakan dalam dokumen-dokumen pembangunan di berbagai negara.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015 sebagai konsep bersama negara-negara anggota PBB (Fauzi dan Oktavianus, 2014)/ Perserikatan Bangsa-Bangsa merancang dan menyepakati 15 tahun (2016-2030), para anggotanya akan mencapai 17 tujuan dengan 169 target capaiannya.

Dalam usaha mengkoordinasikan implementasi *SDGs* pada tingkat daerah di negara-negara Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, dibentuklah *The United City and Local Government – Asia Pasific* (UCLG-ASPAC).

Selanjutnya UCLG-ASPAC dan sekumpulan organisasi pemerintah lokal dan regional sedunia berkumpul di *the Global Task force of the Local and Regional Government* (di *UN Headquarter, New York*, 16 Juli 2018) untuk menyepakati bahwa pencapaian *SDGs* tergantung penuh pada rasa kepemilikan penuh terhadap beban kerja *the Global Task Force* yang berupaya untuk melokalkan *SDGs*.

Pemerintahan lokal dan regional di seluruh dunia juga yakin bahwa mereka memiliki peran kunci dalam memicu rasa kepemilikan itu, dan tanggung jawab penting dalam mendorong implementasi dengan mengintegrasikan berbagai agenda *SDGs* di lapangan dan memastikan kohesinya dalam wilayah kerja masing-masing.

Tampaknya, *SDGs* akan berjalan sesuai rencana, dengan atau tanpa campur tangan perguruan tinggi, khususnya jurusan

pengembangan masyarakat. Apa relevansi kajian Pengembangan Masyarakat Islam dalam pencapaian *SDGs*?

### A. Peran Dominan Pemerintah

Pemerintahan pada berbagai tingkatan telah berupaya meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan melokalkan *SDGs*. Tiap pemerintah daerah berada pada tahapan yang berbeda dalam proses melokalkan *SDGs*, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan aktif para pemimpin daerah dalam proses tersebut (*The Global Task Force, 2016*). Di Indonesia, upaya melokalkan *SDGs* sudah diatur, baik dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maupun dalam aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Proses awal melokalkan *SDGs* di Indonesia adalah penyelarasan pencapaian *SDGs* dengan pembangunan nasional. Pemerintah daerah diwajibkan oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di atas untuk melakukan penyelarasan program-program kerjanya dengan target-target yang tertera di *SDGs* dengan menyusun sebuah dokumen khusus dibawah koordinasi BAPPENAS dan BAPPEDA bernama Rancangan Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB). Dokumen yang merujuk pada dokumen serupa di tingkat nasional (yakni Rancangan Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/RAN-TPB) telah diatur penyusunan dan koordinasi penyusunannya

dalam Permen PPN/BAPPENAS Nomor 7 tahun 2018 di atas.

Sejauh ini, pemerintah baru siap dalam tahapan rancangan koordinasi penyusunan dokumen terkait di tingkat nasional, dokumen RAN-TPB yang diwajibkan Perpres baru diumumkan ke publik per tanggal 5 Juni 2018 (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Sedangkan untuk tingkat daerahpun, kewajiban penyusunan dokumen RAD-TPB tingkat provinsi berlaku selambat-lambatnya 12 bulan setelah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017, atau diselesaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan isi Perpres tersebut. Lambatnya proses pelokalan *SDGs* ini menjadikan BAPPENAS (Brojonegoro, 2018) menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah (RPJMD) dihimbau untuk bisa selaras dengan *SDGs*, baik yang baru membuat RPJMD (periode kepemimpinan baru) ataupun yang telah membuatnya (kepemimpinan lama). Pada banyak propinsi di Indonesia, dokumen RAD-TPB belum tersedia secara public. Seperti, belum ada misalnya di laman website resmi Bappeda Sumatera Barat. Dari 35 provinsi di Indonesia, baru 19 provinsi yang memiliki RAD-TPB per tanggal 2 Mei 2019 (Salsabila, 2019). Hal ini dinilai cukup memakan waktu, hanya untuk perencanaan, terutama untuk menilai kinerja pemerintah daerah atas sejauh mana upaya pelokalan *SDGs* untuk tahun berjalannya yang sudah sepertiga jalan (2016-2020).

Dokumen perencanaan pembangunan daerah umumnya berevolusi, dari sebelumnya mengarahkan analisis isu-isu strategisnya dari penyelarasan capaian pembangunan kepada konsep MDGs menuju pada konsep *SDGs*. MDGs yang disepakati 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, mencakup 8 tujuan global, yang terdiri atas: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4)

menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Lisbet, 2013). Penelitian evaluasi pencapaian MDGs, Yusuf (2016) mengungkapkan bahwa sudah tercapai 49 dari total 67 target MDGs di Indonesia tahun 2015.

Berbeda dengan MDGs, konsep pembangunan *SDGs* meliputi 17 tujuan global dengan 169 target yang juga disetujui oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Ke-17 tujuan *SDGs* tersebut secara nasional disusun ke dalam 4 pilar, yang dirangkum oleh Brojonegoro (2018) sebagai berikut:

**Tabel 1. Pilar Pembangunan *SDGs* dan Tujuan *SDGs* Terkait**

Pilar Pembangunan	(No.) Kata Kunci Tujuan <i>SDGs</i>
a. Sosial	(1) Tanpa kemiskinan (2) Tanpa kelaparan (3) Kehidupan sehat dan sejahtera (4) Pendidikan berkualitas (5) Kesetaraan gender
b. Ekonomi	(7) Energi bersih dan terjangkau (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (9) Industri, inovasi dan infrastruktur (10) Berkurangnya kesenjangan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan
c. Lingkungan	(6) Air bersih dan sanitasi layak (11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

	(13) Penanganan perubahan iklim (14) Ekosistem lautan (15) Ekosistem daratan
d. Hukum dan Tata Kelola	(16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

**Sumber: Brojonegoro (2018)**

Usaha pencapaian tujuan SDGs untuk keempat pilar pembangunan di atas menjadi tanggung jawab pemerintah, mulai dari merencanakan program-program pembangunan yang selaras dengan tujuan SDGs, hingga evaluasinya. Perencanaan strategis dan manajemen kinerja pemerintahan daerah yang baik dapat menjamin tercapainya target-target pembangunan yang ingin dicapai, terkhusus pada tujuan-tujuan SDGs.

Pemerintahan daerah memulai proses perencanaan strategis pembangunannya dengan menyusun RPJMD yang merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam masa waktu 5 (lima) tahun. RPJMD terbaru dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2006-2025 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan, termasuk SDGs.

Di dalam dokumen perencanaan pemerintah, terutama RPJMD, SDGs menjadi sub bagian penting dalam bagian isu-isu strategis yang wajib untuk dituangkan dan dijelaskan keterkaitannya dengan misi-misi pemerintah terkait. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tahapan, Perencanaan strategis pembangunan, secara teoritis, mewajibkan pihak perencana untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal

(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (kesempatan dan tantangan) yang mempengaruhi pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunannya (Bryson, 2011). SDGs adalah salah satu faktor eksternal yang memang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD, seperti yang telah dijelaskan di atas. SDGs telah menjadi arah tujuan global yang setelah melalui berbagai pengkajian ilmiah, mampu mengarahkan tujuan pembangunan berkelanjutan dunia menjadi 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator.

Tetapi, proses perencanaan strategis pembangunan daerah bukan sekadar mempertimbangkan satu faktor eksternal saja/SDGs saja. Banyak lagi faktor eksternal lain (seperti MEA, arah pembangunan nasional dan provinsi) dan faktor-faktor internal (demografi, sumber daya, isu daerah di berbagai aspek pembangunan) dalam proses tersebut yang mengakibatkan tidak semua target SDGs dapat disinkronkan dengan target pembangunan daerah. Sebagai contoh, tujuan SDGs nomor 14 mengenai menjaga dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan dasar laut secara berkelanjutan demi pembangunan berkelanjutan, tidak dapat disinkronkan dengan Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak memiliki wilayah kelautan, sehingga dapat dipastikan tidak terdapat program kerja dengan target-target kinerja dalam upaya penjaga konservasi laut.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dimulai sejak Komite Lingkungan dan Pembangunan PBB (*the Brundtland Commission*) melaporkan sebuah dokumen berjudul *Our Common Future*. Konsep ini dijelaskan sebagai pembangunan yang harus direncanakan demi “memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa harus merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.” Tetapi, tantangan utama komite tersebut adalah untuk mengoperasionalkan resolusi

pembangunan berkelanjutan agar dapat mengarahkan pengambilan keputusan organisasi, dalam hal ini pemerintah. (Caiado dkk, 2018)

SDGs yang menjadi kesepakatan global sejak diratifikasinya dokumen *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisi resolusi para pemimpin dunia di *the General Assembly PBB* pada tanggal 25 September 2015. Agenda ini adalah rencana aksi untuk manusia, planet, kemakmuran dan perdamaian (*people, planet, prosperity, and peace*). Hal ini merupakan upaya global untuk memperkuat perdamaian universal dalam konteks kebebasan yang lebih besar. Memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrem, adalah tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. (PBB, 2015)

Tujuh belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang diumumkan menunjukkan skala dan ambisi dari agenda universal yang baru. Diungkapkan berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dan menyelesaikan apa yang tidak mereka capai, usaha untuk mewujudkan hak asasi manusia dan untuk mencapai kesetaraan gender serta pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Usaha-usaha ini terintegrasi, tak terpisahkan dan menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. (Tusianti, 2013)

SDGs dan target-targetnya terintegrasi dan tak terpisahkan, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Target adalah aspirasi global, dengan tiap-tiap pemerintah menetapkan target sendiri dipandu oleh ambisi global

dengan mempertimbangkan keadaan nasional. Tiap pemerintah juga akan memutuskan bagaimana target aspirasional dan global ini harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan, kebijakan, dan strategi nasional. Penting untuk mengenali hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan proses berkelanjutan lainnya yang relevan, dan dimana peran aktor-aktor pembangunan sepanjang proses tersebut.

## **B. Relevansi Kajian Pengembangan Masyarakat Islam**

Sepertinya semua berada dalam kendali pemerintahan sebagai aktor utama pencapaian tujuan SDGs. Bagaimana dan dimana peran kajian Pengembangan Masyarakat Islam?

Tidak tercantum eksplisit dalam semua dokumen yang terkait dengan SDGs, sesungguhnya peran aktor-aktor pembangunan sangat menentukan semua usaha pencapaian tujuan SDGs tersebut.

Penyusunan kebijakan dalam skala apapun memerlukan peranan aktor-aktor pembangunan. Dalam penyusunan kebijakan setingkat RPJMDes, misalnya, peran aktor tersebut sangat berpengaruh. Aktor yang punya latar belakang berbeda-beda, seperti aparatur desa, kelompok epentingan, intelektual/ sksdemisi, perwakilan LSM, dan lain-lain. Peran aktor-aktor tersebut sangat menentukan dalam perumusan, pelaksanaan maupun pada saat mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dimuat (Kusumanegara, 2010:53).

Pada tingkatan yang lebih tinggi, pemerintahan kota, kabupaten dan propinsi, peran aktor-aktor pembangunan seyogianya semakin meluas, termasuk peran akademisi. Penyusunan RPJMD Kota, Kabupaten atau Propinsi sangat patut kiranya melibatkan peran para akademisi, terutama menyangkut usaha pencapaian tujuan SDGs.

Perlu dicari relevansi kajian jurusan yang terkait. Misalnya, misi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, yaitu:

Melakukan studi-studi baru tentang community development, baik sebagai ilmu maupun sebagai aktivitas manusia, untuk merumuskan konsep-konsep baru pada bidang *community development*; Melakukan studi dan atau riset tentang *community development* untuk menemukan relevansi dan nilai daya-guna fungsional community development ; Menyiapkan tenaga sarjana profesional dalam bidang community development (da'i yang mujtahid, mujaddid dan mujahid) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pengembangan masyarakat dan kelembagaan Islam.

Semua misi jurusan PMI tersebut sangat relevan dan terkait langsung dengan ke-17 butir tujuan SDGs. Akademisi dan lulusan PMI baik sebagai analis kebijakan publik, sebagai peneliti sosial, ataupun pelaku dan penggerak LSM, antara lain adalah peran-peran aktor yang paling relevan dalam pencapaian tujuan SDGs.

Tiada kata lain, bahwa semua kajian pengembangan masyarakat adalah bagian integral yang harusnya berada pada arus utama usaha-usaha pencapaian tujuan-tujuan SDGs.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Badan Pusat Statistik. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Brojonegoro, B. 2018. *Tantangan dan Strategi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kuliah Umum TPB/SDGs Universitas Padjadjaran Bandung, 4 April 2018, <http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/Prof.-Bambang-Brojonegoro-Tantangan-dan-Strategi-Pelaksanaan-SDGs-di-Indonesia.pdf> [diakses tanggal 10 April 2020]

Fauzi, A. dan A. Oktavianus. 2014. *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(1): 68-83, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4780/08-Akhmad%20Fauzi.pdf;sequence=1> [diakses tanggal 10 April 2020]

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2018. *The Launching of National Action Plan (NAP) 2017-2019 to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)*. Press Release Kementerian PPN/Bappenas, 5 Juni 2018. [https://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/31603/8804/](https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/31603/8804/)[diakses tanggal 8 April 2020]

Kusumanegara, Solahuddin, 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Gava Media

Lisbet. 2013. *Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional*. *Jurnal Politica* 4(1): 130-156, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/331/265> [diakses tanggal 13 Desember 2019]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. [http://birohukum.bappenas.go.id/data/data\\_permen/Salinan\\_Peraturan\\_Menteri\\_PPN\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2018.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Salinan_Peraturan_Menteri_PPN_Nomor_7_Tahun_2018.pdf)[diakses tanggal 8 April 2020]

Persatuan Bangsa-Bangsa. 2015. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: General Assembly 70th session agenda item 15 and 116.

Presiden Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.  
<http://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/Perpres%20Nomor%2059%20Tahun%202017%20.pdf> [diakses tanggal 3 Agustus 2019]

Riyadi, B. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Salsabila, P. 2 Mei 2019. Baru 19 Provinsi yang Miliki Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan. Majalah Bisnis.com.  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20190502/45/917729/baru-19-provinsi-yang-miliki-rencana-aksi-pembangunan-berkelanjutan> [diakses tanggal 2 Desember 2019]

Yusuf, G. 2016. *Integrating SDGs to Development Plan. Presentasi Kementerian PPN/Bappenas di Bangkok, Thailand, 24-25 Oktober 2016*,  
[https://www.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Opening%20-%20Country%20Reflections%20-%20Indonesia%20\(by%20Mr.%20Jusuf\).pdf](https://www.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Opening%20-%20Country%20Reflections%20-%20Indonesia%20(by%20Mr.%20Jusuf).pdf) [diakses tanggal 10 Desember 2019]